

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut badan anti korupsi dunia yaitu *Transparency International* mengungkapkan bahwa *Corruption Perceptions Index* merupakan instrument yang dikeluarkan untuk mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik suap di suatu daerah. Nilai indeks dimulai dari 0 yang berarti negara tersebut sangat korup hingga nilai 100 yang artinya sudah tidak ada korupsi. Negara-negara yang menempati peringkat teratas merupakan negara dengan angka korupsinya sangat kecil sedangkan peringkat bawah adalah negara-negara yang korupsinya sangat besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Transparency International*, pada tahun 2017 Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dan Indonesia memiliki skor sebesar 37 pada tingkat pusat atau provinsi. Melihat data tersebut, korupsi di Indonesia masih terbilang sangat tinggi. *Indonesia Corruption Watch* mencatat dari mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017 terdapat 226 kasus korupsi dengan jumlah tersangka sebanyak 587 orang. Kasus korupsi tersebut merugikan negara sekitar Rp 1,83 triliun dan nilai suap sebesar Rp 118,1 miliar. Kasus korupsi paling rentan dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi (*Transparency.org* diakses pada 20 April 2018).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain

yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi. Pertama adalah sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain. Kedua adalah intensitas moral seseorang atau kelompok. Ketiga adalah remunerasi atau pendapatan penghasilan yang minim. Keempat adalah pengawasan baik bersifat internal-eksternal dan kelima adalah budaya taat aturan (Riyanto, 2009).

Tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal disemua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, lingkungan masyarakat dan lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika (Hardjapamekas, 2008 dalam Buku Pendidikan Anti Korupsi 2011:39).

Kecurangan atau *fraud* merupakan kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan. Pada lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh instansi atau perusahaan (Ricky, 2017).

Motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan relatif bermacam-macam. Salah satunya yaitu teori yang dicetuskan oleh Dr. Donald Cressy yaitu salah satu pendiri ACFE mengatakan bahwa penyebab seseorang melakukan tindak kecurangan karena adanya *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan rasionalisasi (Karyono, 2013).

Fraud dapat merugikan keuangan perusahaan maupun negara. Pelaku *fraud* biasanya dilakukan oleh oknum pimpinan dan pegawai yang bekerja pada suatu organisasi atau tempat perusahaan dia bekerja, bahkan pelakunya ada dari orang yang tugas fungsinya mengoperasikan sistem operasi instansi dan juga menjalankan sistem pengendalian intern (Manossoh, 2016).

Tindakan *fraud* merugikan beberapa pihak terutama pemerintah. Berdasarkan Survei Fraud Indonesia 2016, responden menjawab pihak yang paling dirugikan dalam *fraud* adalah pemerintah sebesar 81,2% sebagai jenis atau lembaga yang dirugikan akibat *fraud*. Kemudian diikuti oleh perusahaan negara atau BUMN sebesar 8,1% serta perusahaan swasta (Survei Fraud Indonesia, 2016).

Melihat tingkat korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Tentu saja hal itu sangat berkaitan dengan kinerja dari pihak pemerintah pusat maupun daerah. Namun kasus korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah Jakarta Timur sangat jarang terdengar. Selain itu pemerintah kota Jakarta Timur juga telah mendapatkan beberapa penghargaan atas keberhasilan dari kinerja pemerintah (timur.jakarta.go.id diakses pada 27 Mei 2018).

Jakarta Timur mendapatkan beberapa penghargaan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun penghargaan tersebut diantaranya yaitu mendapatkan penghargaan adipura sebagai kota terbersih dan terminal terbaik. Penghargaan tersebut diberikan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang baik dalam tata kelola lingkungan hidup dan pengelolaan terminal (tribunnews.com diakses pada 28 Mei 2018).

Dalam perayaan Hari Guru Nasional 2017, presiden Jokowi memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah Jakarta Timur sebagai kota yang berhasil dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada wilayah Jakarta Timur. Pemerintah Daerah Jakarta Timur dinilai berhasil dalam berkomitmen untuk membangun pendidikan, profesional dan kesejahteraan para guru (Tempo.com diakses pada 28 Mei 2018).

Selain itu pemerintah kota Jakarta Timur meraih penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Koordinator Pembangun Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) atas komitmen dan partisipasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan keamanan pangan di pasar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Timur mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan adanya kerjasama yang baik antara semua pihak terutama SKPD dan UKPD (timur.jakarta.go.id diakses pada 28 Mei 2018).

Dalam mendapatkan penghargaan tersebut tentu dikarenakan adanya kinerja pemerintah yang sangat optimal. Kinerja yang baik tersebut tidak terlepas dari peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam pengelolaan

uang rakyat, pemerintah daerah dipercaya untuk melaksanakan serangkaian program untuk kepentingan khalayak, bukan hanya golongan tertentu. Saat ini, masyarakat sudah sangat cerdas dalam menganalisa kinerja pemerintah (timur.jakarta.go.id diakses pada 28 Mei 2018).

Namun, pada salah satu suku dinas di Jakarta Timur juga ada yang terkena kasus korupsi. Kasus korupsi tersebut dilakukan oleh kepala suku dinas pertamanan Jakarta Timur, Mimi Rahmawati. Kasus korupsi itu terjadi ketika Mimi diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana sebesar Rp 70,5 miliar rupiah untuk merekrut penyapu jalanan. Kenyataannya, Mimi bersekongkol untuk merekrut 200 pekerja fiktif dan mengantongi dana tersebut (tribunnews.com diakses pada 28 Mei 2018).

Tugas pokok dan fungsi SKPD sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan daerah yang secara eksplisit berisi tugas pokok dan fungsi SKPD adalah Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut (Hardaniati, 2012).

Pembuatan APBD tidak lepas dari peran manajer dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sendiri. APBD disusun dan dirancang oleh SKPD sesuai bidangnya. Dalam pembuatan APBD, setiap SKPD mempunyai program masing-masing untuk dijalankan demi meningkatkan pelayanan masyarakat (Nugraha, 2015).

Menurut Najahningrum (2013) dan Prapnalia (2015), potensi kecenderungan terjadinya *fraud* bisa dikarenakan faktor keefektifan pengendalian internal. Sedangkan menurut Ahriati (2015), keefektifan pengendalian internal tidak mempengaruhi kecenderungan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka (2014), Lia (2016) dan Ricky (2017) menyatakan bahwa budaya etis organisasi mempengaruhi kecenderungan *fraud*. Sedangkan menurut Aditya (2017) budaya etis organisasi tidak mempengaruhi kecenderungan *fraud*.

Putu (2015), Prapnalia (2015) dan Lia (2016) menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*. Sedangkan, Mustika (2016) menyatakan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Lia *et al* (2016) mengatakan adanya faktor kesempatan akan membuka peluang untuk seseorang melakukan kecurangan. Kesempatan ini dipengaruhi oleh faktor keefektifan pengendalian internal. Jika pengendalian internal suatu entitas lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan akan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat sesuai standar, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil dengan upaya pencegahan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan bisa terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Najahningrum (2013), Lia (2013), Aditya (2017), Ricky (2017) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud*.

Selain itu, menurut Ricky (2017) budaya etis organisasi juga memiliki peran penting terhadap pencegahan tindakan kecurangan. Dengan adanya budaya etis ini diharapkan setiap anggota organisasi bisa bertindak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku. Budaya etis organisasi merupakan suatu perspektif untuk memahami perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky (2017) berpengaruh negatif sedangkan Najahningrum (2013), Aditya (2017) menyatakan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud*.

Kesesuaian kompensasi faktor yang juga mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Karyawan yang bekerja keras dan menunjukkan loyalitasnya kepada perusahaan atau entitas maka kompensasi yang diterimanya akan semakin besar. Dengan kompensasi yang diberikan sesuai dengan harapan karyawan akan memberikan timbal balik dalam kepuasan kerja dan tidak melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi demi mendapat keuntungan pribadi sehingga menutup peluang terjadinya *fraud* (Lia, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lia (2016) menyatakan berpengaruh negatif sedangkan Fitri (2017) dan Aditya (2017) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Pada SKPD Wilayah Jakarta Timur”**.

B. Perumusan Masalah

Pengendalian internal memiliki peranan penting karena sistem pengendalian internal merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Pengendalian internal digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal. Perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen instansi juga tergantung pada tanggung jawab dan moralitas instansi tersebut. Pada tingkat operasional, tanggung jawab moral diwakili oleh manajemen sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen akan mencerminkan moralitasnya. Kepuasan kesesuaian kompensasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis dan kecenderungan akuntansi. Apabila kompensasi sesuai maka individu diharapkan mendapatkan kepuasan sehingga tidak melakukan perilaku tidak etis serta berlaku curang dalam akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Sebaliknya penghasilan yang tidak sesuai akan mendorong individu untuk cenderung melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi atau *Fraud*.

1. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada SKPD wilayah Jakarta Timur?
2. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada SKPD wilayah Jakarta Timur?

3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* pada SKPD wilayah Jakarta Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu

1. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan *fraud* pada SKPD wilayah Jakarta Timur.
2. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan *fraud* pada SKPD wilayah Jakarta Timur.
3. Untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan *fraud* pada SKPD wilayah Jakarta Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi dunia akademisi khususnya dalam bidang pendidikan akuntansi pada perguruan tinggi untuk pembelajaran bahwa pentingnya persepsi pegawai tentang keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi dan kesesuaian kompensasi dalam mengurangi kecurangan pada sektor pemerintah.
2. Memberi masukan bagi masyarakat mengenai pentingnya untuk peduli terhadap proses dan bagaimana pengelolaan APBD

yang sesungguhnya agar tercapainya tujuan yang hendak dicapai.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait pengendalian internal, budaya etis organisasi, kesesuaian kompensasi, dan kecurangan yang lebih komprehensif.